

BAGIAN ANGGARAN 089



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017 (UNAUDITED)

**PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI PAPUA
SEBAGAI
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
TAHUN ANGGARAN 2017**

**NOMOR : LAP-53/PW26/1/2018
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2018**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPKP Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan, sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pusat BPKP. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

28
Jayapura, Februari 2018

W Kepala Perwakilan, 4

—
Sueb Cahyadi
NIP 19640508 198603 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Grafik	iii
Daftar Lampiran	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	8
A.3. Basis Akuntansi	9
A.4. Dasar Pengukuran	10
A.5. Kebijakan Akuntansi	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	19
B.2. Belanja Negara	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
C.1. Aset Lancar	25
C.2. Aset Tetap	26
C.3. Kewajiban Jangka Pendek	30
C.4. Ekuitas	31
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	32
D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	32
D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	37
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	39
E.1. Ekuitas Awal	39
E.2. Surplus/(Defisit) LO	39
E.3. Transaksi Antar Entitas	39
E.4. Ekuitas Akhir	40
F. Informasi Penting Lainnya	41
F.1. Informasi Dana Penugasan Bantuan Kedinasan	41

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

		Halaman
Tabel 1	: Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN Tahun 2017	20
Tabel 2	: Perbandingan Realisasi PNBPN Tahun 2017 dan 2016	20
Tabel 3	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2017	20
Tabel 4	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Triwulan III TA 2017	21
Tabel 5	: Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2017 dan 2016	21
Tabel 6	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017	22
Tabel 7	: Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017 dan 2016	22
Tabel 8	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2017	23
Tabel 9	: Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2017 dan 2016	23
Tabel 10	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2017	24
Tabel 11	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2017 dan 2016	24
Tabel 12	: Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	25
Tabel 13	: Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	25
Tabel 14	: Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	26
Tabel 15	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017	29
Tabel 16	: Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	30
Tabel 17	: Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	30
Tabel 18	: Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	32
Tabel 19	: Rincian Beban Operasional per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	33
Tabel 20	: Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	34
Tabel 21	: Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	35
Tabel 22	: Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	35
Tabel 23	: Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	36
Tabel 24	: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	37
Grafik 1	: Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2017	21

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Keuangan Pokok
 - A. Laporan Realisasi Anggaran
 - B. Neraca
 - C. Laporan Operasional
 - D. Laporan Perubahan Ekuitas
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
3. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah
4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
5. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
6. Laporan Barang Pengguna - SIMAK BMN
7. Daftar Persediaan - SIMAK BMN







BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2017 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.


Jayapura, Februari 2018
 Kepala Perwakilan, 


Sueb Cahyadi
NIP 19640508 198603 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara s.d 31 Desember 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp44.711.786,00. Dalam TA 2017 Perwakilan BPKP Provinsi Papua tidak membuat estimasi pendapatan.

Realisasi Belanja Negara s.d 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp20.666.573.211,00 atau mencapai 95,77 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp21.578.323.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp60.779.701.308,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp177.361.398,00, dan Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp60.602.339.910,00,

Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2017 masing-masing Rp95.084.096,00 dan Rp60.684.617.212,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp34.705.154,00 sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp20.934.741.191,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional sebesar (Rp20.900.036.037,00).

Kegiatan Non Operasional terjadi surplus sebesar Rp8.737.637,00, sehingga sampai dengan 31 Desember 2017 Kantor Perwakilan BPKP mengalami Defisit-LO sebesar (Rp20.891.298.400,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp32.149.522.439,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp20.891.298.400,00, ditambah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Rp28.804.531.748,00, kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp20.621.861.425,00 sehingga Ekuitas BPKP pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp60.684.617.212,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2017			31 DESEMBER TA 2016
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI THD ANGGARAN	
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1				
■ Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	44.711.786	100,00	23.401.593
Jumlah Pendapatan		-	44.711.786	100,00	23.401.593
BELANJA	B.2				
Rupiah Murni		21.578.323.000	20.666.573.211	95,77	25.295.085.834
■ Belanja Pegawai	B.2.1	14.880.400.000	14.361.904.825	96,52	14.267.896.164
■ Belanja Barang	B.2.2	5.971.243.000	5.578.242.386	93,42	10.222.351.679
■ Belanja Modal	B.2.3	726.680.000	726.426.000	99,97	804.837.991
Jumlah Belanja		21.578.323.000	20.666.573.211	95,77	25.295.085.834

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA

**PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016**

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2017	31 DES 2016
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
■ Persediaan	C.1.1	177.361.398	237.525.067
JUMLAH ASET LANCAR		177.361.398	237.525.067
ASET TETAP	C.2		
■ Tanah	C.2.1	39.222.187.000	20.035.484.000
■ Peralatan dan Mesin	C.2.2	5.535.621.283	5.372.471.283
■ Gedung dan Bangunan	C.2.3	20.829.686.000	13.942.058.619
■ Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	249.363.000	90.481.000
■ Akumulasi Penyusutan	C.2.5	(5.234.517.373)	(7.489.512.314)
JUMLAH ASET TETAP		60.602.339.910	31.950.982.588
JUMLAH ASET		60.779.701.308	32.188.507.655
NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2017	31 DES 2016
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.3		
■ Utang Kepada Pihak Ketiga	C.3.1	95.084.096	38.985.216
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		95.084.096	38.985.216
JUMLAH KEWAJIBAN		95.084.096	38.985.216
EKUITAS			
■ Ekuitas	C.4.1	60.684.617.212	32.149.522.439
JUMLAH EKUITAS		60.684.617.212	32.149.522.439
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		60.779.701.308	32.188.507.655

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2017	31 DES 2016
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1		
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1.1		
■ Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.1.1	34.705.154	23.181.374
Jumlah Pendapatan Operasional (D.1.1.1)	D.1.1	34.705.154	23.181.374
BEBAN OPERASIONAL	D.1.2		
■ Beban Pegawai	D.1.2.1	14.406.039.825	14.255.447.018
■ Beban Persediaan	D.1.2.2	185.224.824	266.388.593
■ Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	1.369.756.128	1.091.618.983
■ Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	607.458.383	534.627.580
■ Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	3.486.661.605	8.288.966.332
■ Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.6	879.600.426	719.217.515
Jumlah Beban Operasional (D.1.2.1 s.d. D.1.2.6)	D.1.2	20.934.741.191	25.156.266.021
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1-D.1.2)	D.1	(20.900.036.037)	(25.133.084.647)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.2		
SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.2.1		
■ Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.1.1	11.509.452	8.499.369
■ Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.1.2	2.771.815	238.842
Jumlah Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (D.2.1.1- D.2.1.2)	D.2.1	8.737.637	8.260.527
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (D.2.1+D.2.2)	D.2	8.737.637	8.260.527
SURPLUS / (DEFISIT) - LO (D.1+D.2)		(20.891.298.400)	(25.124.824.120)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2017	31 DES 2016
EKUITAS AWAL	E.1	32.149.522.439	31.704.120.451
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	E.2	(20.891.298.400)	(25.124.824.120)
KOREKSI YANG MENAMBAH/(MENGURANGI) NILAI EKUITAS			
■ Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1	28.804.531.748	-
■ Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.2	-	21.321.867
Jumlah Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas	E.3	28.804.531.748	21.321.867
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4		
■ Ditagihkan ke Entitas Lain	E.4.1	20.666.537.211	25.295.085.834
■ Diterima dari Entitas Lain	E.4.2	(44.711.786)	(23.401.593)
■ Transfer Masuk	E.4.3	-	277.220.000
Jumlah Transaksi Antar Entitas	E.4	20.621.861.425	25.548.904.241
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2+E.3+E.4)	E.5	28.535.094.773	445.401.988
EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4+E.5)	E.6	60.684.617.212	32.149.522.439

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Profil dan
Kebijakan Teknis*

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 mengatur bahwa BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada *stakeholder* dan *shareholder*. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses *governance*, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan BPKP berperan dalam mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Perwakilan BPKP Provinsi Papua dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016.

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

- ✚ Kepala Perwakilan BPKP : Sueb Cahyadi
- ✚ Kepala Bagian Tata Usaha : Hari Santosa
- ✚ Koordinator Pengawasan Kelompok : Tri Winarno
JFA Bidang Instansi Pemerintah Pusat
- ✚ Koordinator Pengawasan Kelompok : Yulian Tri Nugroho
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah I
- ✚ Koordinator Pengawasan Kelompok : Bonifacius Fredy Joko
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah II
- ✚ Koordinator Pengawasan Kelompok : Martiknyo
JFA Bidang Akuntan Negara
- ✚ Koordinator Pengawasan Kelompok : Agus Sunaryo
JFA Bidang Investigasi
- ✚ Koordinator Pengawasan Bidang : Nurtjahyo Sigit Waluyo
Perencanaan, Pelaporan dan Pembinaan
APIP

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua per 31 Desember 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Perwakilan BPKP Provinsi Papua menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPKP dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPKP adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPKP adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila

peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur secara handal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Tarif Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.
- Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu dicatat sebagai koreksi terhadap nilai aset yang bersangkutan pada saat pengembalian tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian

berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurangan ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah

diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan

tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan	25

Varietas Tanaman Tahunan	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pagu awal anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2017 adalah sebesar Rp22.519.478.000,00 dan direvisi menjadi Rp21.578.323.000,00. Rincian pagu per Jenis Belanja adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja		Jumlah Anggaran (Rp)	
Kode	Uraian	Awal (Rp)	Revisi (Rp)
51	Belanja Pegawai	15.498.182.000	14.880.400.000
52	Belanja Barang	6.294.616.000	5.971.243.000
53	Belanja Modal	726.680.000	726.680.000
Total Belanja		22.519.478.000	21.578.323.000

Sedangkan apabila dilihat dari program, maka pagu belanja adalah sebagai berikut:

Uraian Program	Jumlah Pagu
	Revisi (Rp)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	18.792.016.000
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	2.786.307.000
Total	21.578.323.000

*Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah
Rp44.711.786,00*

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah s.d Tahun 2017 adalah sebesar Rp44.711.786,00 atau 100,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Keseluruhan Pendapatan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Papua merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP Lainnya Tahun 2017 disajikan pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN s.d Tahun 2017

Jenis Pendapatan	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%tase
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	44.711.786	100,00
Total	-	44.711.786	100,00

Apabila dibandingkan dengan TA 2016, terdapat kenaikan realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp21.310.193,00 atau 91,06 %. Perbandingan realisasi PNBPN TA 2017 dan TA 2016 disajikan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Perbandingan Realisasi PNBPN TA 2017 dan TA 2016

Uraian Jenis PNBPN	Realisasi PNBPN (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2017	TA 2016	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan Pemanfaatan BMN	34.280.870	20.959.811	13.321.059	63,56
Pendapatan Iuran dan Denda	424.284	2.221.563	(1.797.279)	(80,90)
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	10.006.632	220.219	9.786.413	4.443,95
Total	44.711.786	23.401.593	21.310.193	91,06

Pendapatan Pemanfaatan BMN merupakan pendapatan yang diperoleh atas sewa BMN oleh pihak ketiga.

Realisasi Belanja Negara
Rp20.666.573.211,00

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Perwakilan BPKP Provinsi s.d TA 2017 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp20.666.573.211,00 atau 95,77 persen dari anggaran sebesar Rp21.578.323.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja menurut program TA 2017 disajikan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2017

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	18.792.016.000	17.936.998.936	95,45
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	2.786.307.000	2.729.574.275	97,96
Total	21.578.323.000	20.666.573.211	95,77

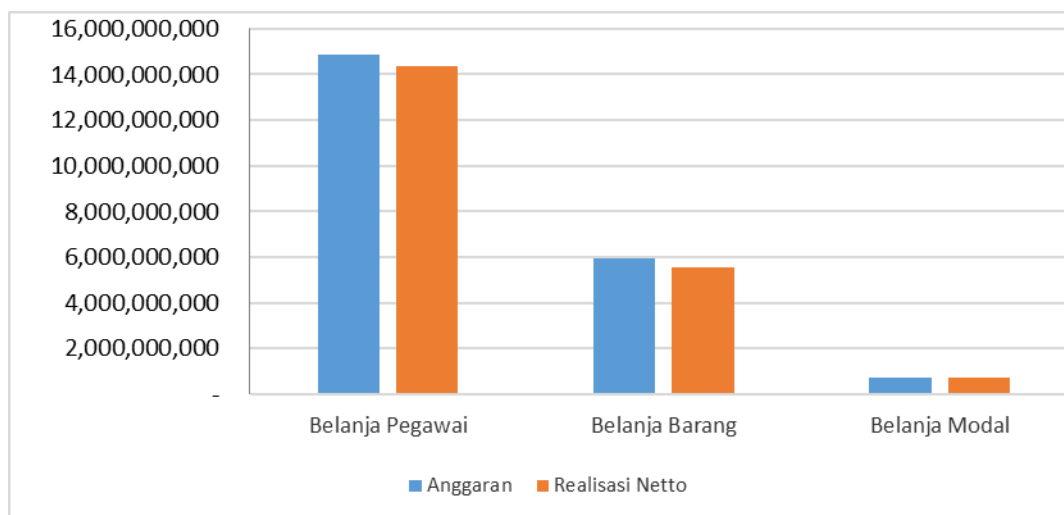
Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja
Tahun 2017

Jenis Belanja		Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	% tase
Kode	Uraian			
51	Belanja Pegawai	14.880.400.000	14.361.904.825	96,52
52	Belanja Barang	5.971.243.000	5.578.242.386	93,42
53	Belanja Modal	726.680.000	726.426.000	99,97
	Total	21.578.323.000	20.666.573.211	95,77

Komposisi anggaran dan realisasi belanja Tahun 2017 disajikan pada grafik berikut ini:

Grafik 1
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2017



Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2016, terdapat penurunan realisasi belanja Tahun 2017 sebesar Rp4.628.512.623,00 atau 18,30% dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp25.295.085.834,00. Perbandingan realisasi belanja TA 2017 dan TA 2016 disajikan pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan TA 2016

Jenis Belanja		Realisasi Netto (Rp)		Naik/ (Turun)	
Kode	Uraian	TA 2017	TA 2016	Jumlah (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	14.361.904.825	14.267.896.164	94.008.661	0,66
52	Belanja Barang	5.578.242.386	10.222.351.679	(4.644.109.293)	(45,43)
53	Belanja Modal	426.426.000	804.837.991	(78.837.991)	(9,74)
	Total	20.666.573.211	25.295.085.834	(4.628.512.623)	(18,30)

Belanja Pegawai
Rp14.361.904.825,00

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan TA 2016 masing-masing sebesar Rp14.361.904.825,00 dan Rp14.267.896.164,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017 disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunj. PNS	7.265.634.000	6.985.405.808	96,14
Belanja Lembur	115.566.000	77.104.000	66,72
Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito	7.499.200.000	7.299.395.017	97,34
Total	14.880.400.000	14.361.904.825	96,52

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2016, terdapat kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp94.008.661,00 atau 0,66 %. Perbandingan realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan TA 2016 disajikan pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan TA 2016

Uraian	Realisasi Netto (Rp)		Naik/ (Turun)	
	TA 2017	TA 2016	Jumlah (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunj. PNS	6.985.405.808	7.370.014.902	(384.609.094)	(5,22)
Belanja Lembur	77.104.000	-	77.104.000	100
Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito	7.299.395.017	6.897.881.262	401.513.755	5,82
Total	14.361.904.825	14.267.896.164	94.008.661	0,66

Belanja Barang
Rp5.578.242.386,00

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan TA 2016 masing-masing sebesar Rp5.578.242.386,00 dan Rp10.222.351.679,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2017 disajikan pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	1.169.130.000	1.030.344.827	88,13
Belanja Barang Non Operasional	54.792.000	29.050.000	53,02
Belanja Barang Persediaan	136.354.000	127.852.100	93,76
Belanja Jasa	330.000.000	298.397.421	90,42
Belanja Pemeliharaan	617.200.000	605.936.433	98,18
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.663.767.000	3.486.661.605	95,17
Total	5.971.243.000	5.578.242.386	93,42

Ababila dibandingkan dengan realisasi TA 2016, terdapat penurunan realisasi Belanja Barang sebesar Rp4.644.109.293,00 atau 45,43 %. Perbandingan realisasi Belanja Barang TA 2017 dan TA 2016 disajikan pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan TA 2016

Uraian	Realisasi Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2017	Tahun 2016	Jumlah (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	1.030.344.827	788.124.411	242.220.416	30,73
Belanja Barang Non Operasional	29.050.000	37.270.000	(8.220.000)	(22,06)
Belanja Barang Persediaan	127.852.100	291.071.630	(163.219.530)	(56,08)
Belanja Jasa	298.397.421	275.588.686	22.808.735	8,28
Belanja Pemeliharaan	605.936.433	541.330.620	64.605.813	11,93
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.486.661.605	8.288.966.332	(4.802.304.727)	(57,94)
Total	5.578.242.386	10.222.351.679	(4.644.109.293)	(45,43)

Belanja Modal
Rp726.426.000,00

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun 2017 sebesar Rp726.426.000,00 dari anggaran sebesar Rp726.680.000,00 atau 99,97%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2017 disajikan pada Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163.320.000	163.150.000	100
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	563.360.000	563.276.000	99,99
Total	726.680.000	726.426.000	99,97

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2016, terdapat penurunan realisasi Belanja Modal sebesar Rp78.811.991,00 atau 9,74 %. Perbandingan realisasi Belanja Modal TA 2017 dan TA 2016 disajikan pada Tabel 11 berikut ini:

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA Tahun 2017 dan TA 2016

Uraian	Realisasi Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2017	Tahun 2016	Jumlah (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163.150.000	-	163.150.000	100
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	563.276.000	804.837.991	(241.561.991)	(30,01)
Total	726.426.000	804.837.991	(78.811.991)	(9,74)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp177.361.398,00

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp177.361.398,00 dan Rp237.525.067,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 disajikan pada Tabel 12 berikut ini:

Tabel 12
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

No.	Aset Lancar	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Persediaan	177.361.398	237.525.067
	Jumlah	177.361.398	237.525.067

Persediaan
Rp177.361.398,00

C.1.2. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp177.361.398,00 dan Rp237.525.067,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 disajikan pada Tabel 13 berikut ini:

Tabel 13
Rincian Persediaan per 31 Desember dan 31 Desember 2016

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Barang Konsumsi	153.893.716	217.094.515
2	Bahan untuk Pemeliharaan	12.309.000	12.936.000
3	Persediaan Lainnya	11.158.682	7.494.552
	Jumlah	177.361.398	237.525.067

Semua jenis persediaan dengan nilai sebesar Rp177.361.398,00 berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp60.602.339.910,00

C.2. Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp60.602.339.910,00 dan Rp31.950.982.588,00, yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas (12) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 disajikan pada Tabel 14 berikut ini:

Tabel 14
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

No.	Uraian	31 Desember 2017	31 Des 2016 (Rp)
1	Tanah	39.222.187.000	20.035.484.000
2	Peralatan dan Mesin	5.535.621.283	5.372.471.283
3	Gedung dan Bangunan	20.829.686.000	13.942.058.619
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	249.363.000	90.481.000
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Nilai Perolehan		65.836.857.283	39.440.494.902
Akumulasi Penyusutan		(5.234.517.373)	(7.489.512.314)
Nilai Buku		60.602.339.910	31.950.982.588

Tanah
Rp39.222.187.000,00

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPKP per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing seluas 27.722m² dengan nilai sebesar Rp39.222.187.000,00 dan Rp20.035.484.000,00. Selama tahun 2017 terjadi kenaikan nilai perolehan tanah dikarenakan adanya revaluasi aset.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	Rp20.035.484.000,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian	-
Selisih Revaluasi Aset	Rp19.186.703.000,00
Hibah	-
Reklasifikasi	-
Mutasi Kurang:	
Penghapusan	-
Saldo per 31 Desember 2017	Rp39.222.187.000,00
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2017	Rp39.222.187.000,00

Peralatan dan
Mesin
Rp5.535.621.283,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp5.535.621.283,00 dan Rp5.372.471.283,00. Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan sebesar Rp674.329.186,00 yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	5.372.471.283
Mutasi Tambah:	
Pembelian	163.150.000
Jumlah Mutasi Tambah	163.150.000
Mutasi Kurang:	
Jumlah Mutasi Kurang	-
Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	5.535.621.283
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	4.861.292.097
Nilai Buku per 31 Desember 2016	674.329.186

Rincian pembelian Peralatan dan Mesin dapat dilihat dalam daftar di bawah ini:

No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Printer Epson L385	8 Unit	3.370.000	26.960.000
2	UPS ICA CT 1082B	2 Unit	3.443.750	6.887.500
3	Mesin Laminating Dinamic	3 Unit	1.337.500	4.132.500
4	Mesin Jilid Spiral Kawat	3 Unit	3.610.000	10.830.000
5	Mesin Jilid Spiral Plastik	3 Unit	3.610.000	10.830.000
6	AC (1,5 PK)	10 Unit	5.725.000	57.250.000
7	Scanner	6 Unit	6.365.000	38.190.000
8	Printer Laser Jet	2 Unit	1.612.500	3.225.000
9	Kamera DSLR	1 Unit	4.845.000	4.845.000
Total				163.150.000

Saldo Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.535.621.283,00 belum termasuk saldo peralatan dan mesin yang dicatat dalam extracomptable sebesar Rp68.132.668,00.

Gedung dan
Bangunan
Rp20.829.686.000

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, masing-masing sebesar Rp20.829.686.000,00 dan Rp13.942.058.619,00. Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp20.392.739.093,00 yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	13.942.058.619
Mutasi Tambah:	
➢ Pengembangan Nilai Aset	563.276.000
➢ Revaluasi Aset Tetap	9.407.132.519
Jumlah Mutasi Tambah	9.970.408.519
Mutasi Kurang	
➢ Koreksi Nilai Aset Tetap	3.082.781.138
Jumlah Mutasi Kurang	3.082.781.138
Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	20.829.686.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	361.264.989
Nilai Buku per 31 Desember 2017	20.468.421.011

Mutasi Tambah:

Pengembangan Nilai Aset berupa rehab rumah negara

Saldo Gedung dan Bangunan sebesar Rp20.829.686.000,00 belum termasuk saldo gedung dan bangunan yang dicatat dalam extracomtable sebesar Rp5.000.000,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp249.363.000,00

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp249.363.000,00 dan Rp90.481.000,00. Sedangkan nilai buku Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp237.402.713,00 yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	90.481.000
Mutasi Tambah: Revaluasi Aset Tetap	210.696.229
Mutasi Kurang	51.814.229
Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	249.363.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	11.960.287
Nilai Buku per 31 Desember 2017	237.402.713

Terdapat penambahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp158.882.000,00 dikarenakan adanya revaluasi aset tetap.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp5.234.517.373,00

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp5.234.517.373,00 dan Rp7.489.512.314,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	39.222.187.000	-	39.222.187.000
2	Peralatan dan Mesin	5.535.621.283	4.861.292.097	674.329.186
3	Gedung dan Bangunan	20.829.686.000	361.264.989	20.468.421.011
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	249.363.000	11.960.287	237.402.713
	Jumlah	65.836.857.283	5.234.517.373	60.602.339.910

Perbandingan Mutasi Akumulasi Penyusutan Tahun 2017 dan 2016

No	Uraian	Saldo per 31/12/2016 (Rp)	Saldo per 31/12/2017 (Rp)	Mutasi (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	4.548.795.809	4.861.292.097	(312.496.288)	312.496.288	-
2	Gedung dan Bangunan	2.883.949.182	361.264.989	2.522.684.193	560.096.945	1.964.914.682
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	56.767.323	11.960.287	44.807.036	7.007.193	37.799.843
	Total	7.489.512.314	5.234.517.373	2.254.994.941	879.600.426	2.000.387.091

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp95.084.096,00

C.3. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp95.084.096,00 dan Rp38.985.216,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan yang seluruhnya merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 disajikan pada Tabel 16 berikut ini:

Tabel 16
Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

No.	Uraian	31 Des 2017 (Rp)	31 Des 2016 (Rp)
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	95.084.096	38.985.216
	Jumlah	95.084.096	38.985.216

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp95.084.096,00

C.3.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp95.084.096,00 dan Rp38.985.216,00. Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga terdiri dari:

Tabel 17
**Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

No.	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Beban Listrik	25.087.096	13.123.216
2	Beban Telpon	-	-
3	Beban Uang Makan Pegawai	69.997.000	25.862.000
4	Beban Kenaikan Gaji Pegawai	-	-
5	Beban Persediaan Konsumsi	-	-
	Jumlah	95.084.096	38.985.216

Ekuitas
Rp60.684.617.212,00

C.4. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban.

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp60.684.617.212,00 dan Rp32.149.522.439,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional (Rp20.900.036.037)

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar minus Rp20.900.036.037,00 dan Rp25.133.084.647,00. Defisit sebesar Rp20.900.036.037,00 merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp34.705.154,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp20.934.741.191,00.

Pendapatan Operasional Rp34.705.154,00

D.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp34.705.154,00 dan Rp23.181.374,00. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Rp34.705.154,00

D.1.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp34.705.154,00 dan Rp23.181.374,00. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO disajikan pada Tabel 18 berikut ini:

Tabel 18
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	31 Des 2017	31 Des 2016	Jumlah	%
Pendapatan Pemanfaatan BMN	34.280.870	20.959.811	13.745.343	63,56
Pendapatan Iuran dan Denda	424.284	2.221.563	(1.797.279)	(80,90)
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	-	-	-	-
Jumlah	34.705.154	23.181.374	11.523.780	49,71

Realisasi Pendapatan Pemanfaatan BMN pada 31 Desember 2017 menurut Laporan Realisasi Anggaran dan menurut Laporan Operasional adalah sebesar Rp34.705.154,00. Pendapatan Pengelolaan BMN merupakan pendapatan yang diperoleh atas

pemanfaatan atau sewa BMN oleh pihak ketiga.

Tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan Operasional per 31 Desember 2017 menurut LO dan LRA:

Uraian	Realisasi		Selisih
	LO	LRA	
Pendapatan Pemanfaatan BMN	34.705.154	34.705.154	-
Jumlah	34.705.154	34.705.154	-

*Beban Operasional
Rp20.934.741.191,00*

D.1.2. Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp20.934.741.191,00 dan Rp25.156.266.021,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional selama Tahun 2016.

Rincian Beban Operasional disajikan pada Tabel 19 berikut ini:

Tabel 19
Rincian Beban Operasional 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi		Naik/ (Turun)	
	Tahun 2017	Tahun 2016	Jumlah	%
Beban Pegawai	14.406.039.825	14.255.447.028	150.592.797	1,06
Beban Persediaan	185.224.824	266.388.593	(81.163.769)	(30,47)
Beban Barang dan Jasa	1.369.756.128	1.091.618.983	278.137.145	25,48
Beban Pemeliharaan	607.458.383	534.627.580	72.830.803	13,62
Beban Perjalanan Dinas	3.486.661.605	8.288.966.332	(4.802.304.727)	(57,94)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	879.600.426	719.217.515	160.382.911	22,30
Jumlah	20.934.741.191	25.156.266.031	(4.221.524.840)	(16,78)

*Beban Pegawai
Rp14.406.039.825,00*

D.1.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp14.406.039.825,00 dan Rp14.255.447.018,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 disajikan pada Tabel 20 berikut:

Tabel 20
Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi		Naik/ (Turun)	
	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Jumlah	%
Belanja Gaji Tunjangan PNS	7.029.540.808	7.357.566.756	(328.025.948)	(4,46)
Belanja Lembur	77.104.000	-	77.104.000	100
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	7.299.395.017	6.897.881.262	401.513.755	5,82
Jumlah	14.406.039.825	14.255.447.018	150.592.807	1,06

Realisasi Belanja Pegawai (netto) 31 Desember 2017 menurut Laporan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp14.361.904.825,00 sedangkan menurut Laporan Operasional adalah sebesar Rp14.406.039.825,00. Dengan demikian terdapat selisih antara Laporan Realisasi anggaran dengan Laporan Operasional sebesar Rp44.132.000,00 yaitu nilai Beban Uang Makan Tahun 2016 yang dibebankan di Tahun 2017.

Tabel Perbandingan Realisasi Beban Pegawai Tahun 2017
Menurut LO dan LRA:

Uraian	Realisasi		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Gaji dan Tunjangan	7.029.540.808	6.985.405.808	44.135.000
Beban Uang Lembur	77.104.000	77.104.000	
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	7.299.395.017	7.299.395.017	-
Jumlah	14.406.039.825	14.361.904.825	44.135.000

Selisih realisasi sebesar Rp121.239.000,00 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Pembayaran Uang Makan Tahun 2018 atas beban Tahun 2017	69.997.000
Pembayaran Uang Makan Tahun 2017 atas beban Tahun 2016	(25.862.000)
Total	44.135.000

Beban Persediaan
Rp185.224.824,00

D.1.2.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing Rp185.224.824,00 dan Rp266.388.593,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan disajikan pada Tabel 21 berikut ini:

Tabel 21

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	31 Des Tahun 2017	31 Des Tahun 2016	Jumlah	%
Beban Persediaan Barang Konsumsi	185.224.824	266.388.593	(81.163.769)	(30,47)
Jumlah	185.224.824	266.388.593	(81.163.769)	(30,47)

Realisasi belanja persediaan (*netto*) tahun 2017 menurut LRA sebesar Rp127.852.100,00, sedangkan menurut LO sebesar Rp185.224.824,00. Perbedaan tersebut disebabkan Belanja Persediaan dicatat sebagai perolehan persediaan di Neraca, sedangkan Beban Persediaan merupakan pemakaian persediaan selama tahun 2017.

Beban Barang dan
Jasa
Rp1.369.756.128,00

D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing Rp1.369.756.128,00 dan Rp1.091.618.983,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan pada Tabel 22 berikut ini:

Tabel 22

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	Tahun 2017	Tahun 2016	Jumlah	%
Beban Barang Operasional	1.030.344.827	788.124.411	242.220.416	30,73
Beban Barang Non Operasional	29.050.000	37.270.000	(8.220.000)	(22,06)

Beban Langganan Daya dan Jasa	280.061.301	246.124.572	33.936.729	13,79
Beban Jasa Profesi	30.300.000	20.100.000	10.200.000	50,75
Jumlah	1.369.756.128	1.091.618.983	(278.137.145)	25,48

Tabel Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember Tahun 2017 menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Barang Operasional	1.030.344.827	1.030.344.827	-
Beban Barang Non Operasional	29.050.000	29.050.000	-
Beban Jasa	310.361.301	298.397.421	(11.963.880)
Jumlah	1.369.756.128	1.357.792.248	(11.963.880)

Selisih realisasi Beban Jasa sebesar Rp11.963.880 adalah selisih Beban Listrik tahun 2016 yang dibebankan di tahun 2017 sebesar Rp13.123.216,00 dan Beban Listrik yang masih harus dibayar tahun 2017 Rp25.087.096,00.

Beban
Pemeliharaan
Rp607.458.383,00

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing Rp607.458.383,00 dan Rp534.627.580,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan disajikan pada Tabel 23 berikut ini:

Tabel 23

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi		Naik/ (Turun)	
	Tahun 2017	Tahun 2016	Jumlah	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	279.543.065	220.092.050	59.451.015	27,01
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	308.574.968	296.004.670	12.570.298	4,25
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	19.340.350	18.530.860	809.490	4,37
Jumlah	607.458.383	534.627.580	72.830.803	13,62

Realisasi belanja pemeliharaan (*netto*) tahun 2017 menurut LRA sebesar Rp605.936.433,00, sedangkan menurut LO sebesar Rp607.458.383,00. Perbedaan tersebut disebabkan Belanja Persediaan Untuk Pemeliharaan dicatat sebagai perolehan persediaan di Neraca, sedangkan Beban Persediaan Pemeliharaan merupakan pemakaian persediaan selama tahun 2017.

D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp879.600.426,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing Rp879.600.426,00 dan Rp719.217.515,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan pada Tabel 24 berikut ini:

Tabel 24
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2017 dan
31 Desember 2016

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	Tahun 2017	Tahun 2016	Jumlah	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	312.496.288	344.438.366	(31.942.078)	(9,27)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	560.096.945	372.642.913	187.454.032	50,30
Beban Penyusutan Irigasi dan Jaringan	7.007.193	2.136.236	4.870.957	228,02
Jumlah	879.600.426	719.217.515	(159.219.194)	(22,30)

Tidak terdapat perbedaan beban penyusutan dan amortisasi tahun 2017 antara LO dan LRA.

Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp8.737.637,00

D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp8.737.637,00 dan Rp8.260.527,00. Jumlah tersebut merupakan Surplus dari Kegiatan Non

Operasional Lainnya.

*Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp8.737.637,00*

D.2.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp8.737.637,00 dan Rp8.260.527,00.

*Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp11.509.452,00*

D.2.1.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp11.509.452,00 dan Rp8.499.369,00.

*Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp2.771.815,00*

D.2.1.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp2.771.815,00 dan Rp238.842,00 dan rincian dari Pendapatan dan Beban dari Kegiatan Non Operasional dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	Tahun 2017	Tahun 2016	Jumlah	%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.771.815	238.842	2.532.973	1.060,52
Jumlah	2.771.815	238.842	2.532.973	1.060,52

Ekuitas Awal
Rp32.149.522.439,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp32.149.522.439,00 dan Rp31.704.120.451,00.

Surplus/(Defisit) LO
(Rp20.890.134.683,00)

E.2. Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar minus Rp20.891.298.400,00 dan Rp25.124.824.120,00. Defisit LO merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari kegiatan operasional sebesar minus Rp20.900.036.037,00 dan surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp8.737.637,00 sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

Transaksi Antar Entitas
Rp20.621.861.425,00

E.3. Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp20.621.861.425,00 dan Rp25.548.904.241,00. Jumlah tersebut terdiri atas:

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Des
Ditagihkan ke Entitas Lain	20.666.573.211	25.295.085.834	28.06
Diterima dari Entitas Lain	(44.711.786)	(23.401.593)	(19
Transfer Masuk	-	277.220.000	
Jumlah	20.621.861.425	25.548.904.241	28.04

Ditagihkan ke Entitas Lain
Rp20.666.573.211,00

E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp20.666.573.211,00 dan Rp25.295.085.834,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara pada tanggal neraca

Diterima dari Entitas Lain
Rp44.711.786,00

E.4.2. Diterima dari Entitas Lain

Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp44.711.786,00 dan

Rp23.401.593,00.

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan negara yang telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal neraca.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp28.804.531.748,00*

E.4.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp 28.804.531.748,00 dan Rp0,00. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan, jembatan dan bangunan air.

*Ekuitas Akhir
Rp60.684.617.212,00*

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp60.684.617.212,00 dan Rp32.149.522.439,00. Nilai tersebut merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp60.779.701.308,00 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp95.084.096,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**F.1. Informasi Dana Penugasan Bantuan Kedinasan**

Selama tahun 2017 kegiatan pengawasan selain didanai dari DIPA juga didanai dari bantuan kedinasan. Kegiatan tersebut berupa pendampingan, bimbingan teknis dan sosialisasi berdasarkan permintaan dari kementerian/lembaga, dan BUMN/BUMD/ BLU yang menjadi mitra kerja Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 jumlah penugasan yang dibiayai dari dana bantuan kedinasan sebanyak 406 PP dan telah terbit 404 LHP, dan realisasi dana bantuan kedinasan sebesar Rp3.957.226.837 00 dengan rincian sebagai berikut:

Bidang	Jumlah Penugasan	Jumlah LHP	Jumlah Dana (Rp)
PKP2T:			
IPP	30	30	462.755.400
Keuangan Daerah I	32	32	543.635.510
Keuangan Daerah II	33	33	552.619.670
Akuntan Negara	12	12	242.185.148
Investigasi	49	49	431.494.672
P3A	27	27	436.095.706
Jumlah PKP2T	183	183	2.668.786.106
Non PKP2T:			
IPP	23	23	324.234.200
Keuangan Daerah I	34	34	1.018.630.583
Keuangan Daerah II	69	69	1.365.157.480
Akuntan Negara	11	11	423.357.942
Investigasi	10	8	324.379.135
P3A	4	4	41.990.517
Jumlah Non PKP2T	151	149	3.497.749.857
Jumlah	334	332	6.166.535.963

Jumlah dana tersebut seluruhnya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh pihak mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja. Pegawai BPKP yang diberi tugas oleh pimpinan unit masing-masing diterbitkan Surat Perintah Dinas (SPD) Nihil dengan beban anggaran mitra kerja, dan pada akhir kegiatan/penugasan pegawai dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi penggantian biaya perjalanan dinas/transport lokal, dan selanjutnya dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja.